

## **RINGKASAN**

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonomi yang nyata.

Untuk mengoptimalkan Asli Daerah beberapa pos Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Ada beberapa jenis pajak di Kabupaten Blora sesuai dengan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parker, dan pajak sarang burung walis. Dari beberapa jenis pajak daerah Kabupaten Blora tersebut, penerimaan pungutan Pajak Penerangan Jalan selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar Rp 709.198.981,00 menunjukan jumlah yang cukup besar bila dibandingkan penerimaan dari hasil pungutan jenis pajak daerah yang lainnya.

Walaupun dari setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kecil. Pajak Penerangan Jalan tersebut memperbesar jumlah pajak daerah yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga digunakan untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Blora.